

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Perencanaan Kebutuhan Obat di Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau saat ini menggunakan metoda konsumsi. Dari hasil identifikasi kendala/masalah yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD), masalah yang dihadapi dalam menyusun rencana kebutuhan obat *Buffer Stok* Provinsi antara lain: Data, Sumber Daya Manusia, dan Faktor Pendukung dalam menyusun rencana kebutuhan obat. Empat skala prioritas utama strategi perbaikan yang diperoleh dalam penyusunan perencanaan yaitu : (1) Bimbingan teknis dan Monitoring evaluasi sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dilakukan dari Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau dan dilakukan secara berkala, (2) Tersedianya buku panduan dan aturan yang jelas tentang jenis obat yang dapat diusulkan seperti DOEN, Fornas dan pedoman JKN sampai ke Puskesmas, (3) Penyediaan SOP dan pedoman penyusunan RKO tertulis, (4) Pengelola Instalasi Farmasi harus tenaga kefarmasian dan tidak dibebani dengan rangkap pekerjaan lain. Nilai TPR (*Total Priority Rating*) masing-masing adalah 37,33; 30,00; 22,66 dan 22,00.
2. Pengembangan perencanaan obat yang mungkin dilakukan untuk menghasilkan perencanaan kebutuhan obat tahunan tingkat Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau yaitu usulan Aplikasi SILO (Sistem Informasi Logistik Obat) sebagai upaya perbaikan perencanaan rencana kebutuhan obat tahunan. Dengan sistem informasi yang baik, diharapkan tingkat ketersediaan obat dapat menjadi lebih baik dan jumlah obat *expired* dapat dikurangi.

## 5.2 Saran

1. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Kesehatan perlu melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah Kepulauan Riau hingga ke Kabupaten/Kota agar memenuhi kebutuhan tenaga kefarmasian dan memfasilitasi seluruh upaya perbaikan yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau.
2. Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau dapat mendukung upaya perbaikan penyusunan perencanaan kebutuhan obat tahunan dengan menyediakan SOP dan pedoman penyusunan RKO tertulis, melakukan bimtek dan monev hingga ke pusat polindes, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk penyediaan buku panduan dan aturan tertulis yang jelas tentang jenis obat yang dapat diusulkan, dan berupaya meningkatkan kerjasama antara tenaga kefarmasian dengan seluruh elemen terkait, mengusulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sosialisasi DOEN, Fornas dan pemanfaatan obat-obat, pelatihan dan *workshop* untuk peningkatan kemampuan dan *skill* pengelola obat.
3. Dalam upaya peningkatan validasi data dalam penyusunan rencana kebutuhan obat di Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau, direkomendasikan aplikasi SILO (Sistem Informasi Logistik Obat). Selanjutnya dalam pemilihan jenis obat yang diprioritaskan, perlu berdasarkan analisis ABC VEN untuk item obat dan BMHP yang akan direncanakan untuk diadakan sehingga ketersediaan obat dapat dikendalikan dan jumlah serta item barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan prioritas.